



Kerangka Acuan Kegiatan

KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 25 November – 10 Desember 2010

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia pada tahun 2010 ini memasuki tahun yang ke-10. Bersama-sama kita telah memulainya di tahun 2001, sepuluh tahun sejak kampanye global ini pertama kali diluncurkan oleh *the Center for Women's Global Leadership* (CWGL) pada tahun 1991. Pelaksanaannya pada tahun ini membawa tuntutan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, karena akan menjadi salah satu penanda gerak langkah solidaritas penggiat kampanye setelah sepuluh tahun berjalan. Seperti halnya komunitas internasional yang memaknai arti penting kampanye tahun ini yang bagi mereka memasuki tahun yang ke-20, Komnas Perempuan pun menjadikan tahun ini menjadi tahun yang penting untuk mengaktifkan kembali gerakan bersama, tidak hanya gerakan perempuan, namun seluruh aktivis pendorong perubahan sosial yang positif di di republik ini. Dengan membawa semangat baru untuk mengeratkan kekuatan solidaritas, Komnas Perempuan kembali mengajak seluruh aktivis yang berjuang untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Perempuan Pembela HAM, HIV/AIDS, Penyandang Cacat, Kerelawanan, gerakan Anti Korupsi, hingga Buruh Migran untuk bergabung bersama dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2010.

Sejak awal peluncurannya, baik di tingkat global maupun di Indonesia, kampanye ini ditujukan untuk menjadi kampanye publik. Rentang waktu yang dipilih, mengaitkan dua momentum penting, yaitu dimulai pada 25 November, yang adalah hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan berakhir pada hari HAM sedunia, 10 Desember. Hal itu dimaksudkan untuk menekankan pesan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak terlepas pula dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Arti penting Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kampanye 16HAKTP)

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) menunjukkan tren yang terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir tujuh kali lipatnya, yaitu mencapai 143.586 pada tahun 2009, dari angka KtP di tahun 2005 (20.391). Jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2001 dimana Komnas Perempuan memulai mendokumentasikan data nasional, angka ini meningkat lebih dari 47 kali lipatnya (angka KtP 2001: 3,169 kasus). Sebagian besar kasus-kasus kekerasan ini terjadi di ranah rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan betapa KtP merupakan masalah serius yang membutuhkan ruang cukup luas bagi masyarakat untuk mengenali, memahami dan terdorong untuk berpartisipasi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Apalagi kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan yang berkait-kelindan dengan berbagai persoalan sosial lainnya belum tergalai utuh dan upaya penuntasannya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Inilah arti penting kampanye 16 Hari sebagai sebuah kampanye publik, yaitu untuk membawa masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang harus disikapi bersama. Kampanye publik diarahkan untuk dapat menggalang kesadaran publik yang pada ujungnya akan membuatnya mampu melakukan advokasi, mulai dari tingkat daerah/lokal, nasional hingga internasional.

Secara spesifik, tujuan dan maksud kampanye 16 Hari adalah:

- Meningkatkan pemahaman publik mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu Hak Asasi Manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
- Memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- Membangun kerjasama yang lebih kukuh untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional

- Mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya meningkatkan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan dalam gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- Menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- Membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan untuk mempertegas tuntutan kepada pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

Peran Komnas Perempuan

Komnas Perempuan telah mengambil peran sebagai inisiator Kampanye 16 Hari di Indonesia pada tahun 2001. Sejak itu pula, Komnas Perempuan menjalin kerjasama dengan para mitra melalui berbagai workshop penyusunan tema, dukungan bagi kampanye-kampanye di daerah, hingga evaluasi penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan mitra di berbagai daerah.

Peran Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan kampanye 16 Hari tahun 2010 ini, adalah:

1. Merumuskan usulan tema kampanye nasional tahun 2010
2. Menyiapkan informasi-informasi yang terkait dengan tema tersebut di atas
3. Menyediakan desain tema yang bisa dipergunakan oleh mitra kampanye
4. Menyediakan dukungan narasumber untuk mendukung kegiatan kampanye di daerah
5. Menyediakan alat kampanye dalam jumlah terbatas (pin, kaos, tas, kalender dan buku agenda)
6. Mengkompilasi agenda kegiatan yang akan dipublikasikan secara meluas melalui media massa, termasuk website dan facebook komnas perempuan, dan jaringan internasional
7. Menyelenggarakan kegiatan kampanye tingkat nasional dan internasional
8. Melakukan penggalangan dana (kampanye G-16) untuk mendukung kerja lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan

Tema Kampanye 16 HAKTP 2010

Kampanye 16 Hari sebagai sebuah kampanye publik yang dilakukan secara luas oleh berbagai pihak di berbagai daerah, memerlukan sebuah tema yang diusulkan sebagai tema bersama agar terwujud kesatuan gerak dan tujuan kampanye. Tema nasional sejak tahun 2001 hingga 2009 adalah:

Tahun/Periode Kampanye	Tema Kampanye Nasional
2001 - 2003	Keberpihakan pada Perempuan Korban Kekerasan
2003 - 2005	Dukungan Masyarakat atas Tanggung jawab Negara untuk pemenuhan Hak-hak Perempuan korban kekerasan
2005 - 2007	Dukungan dan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM
2008	Menuntut komitmen politik pemenuhan hak-hak Perempuan korban kekerasan (dari para calon pemimpin yang bertarung dalam pemilu 2008)
2009	Mari Bicara Kebenaran: Gerakan Mengungkap Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Bagian dari Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia

Untuk tahun 2010 ini, tema yang diangkat oleh Komnas Perempuan adalah “**Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani**”. Kekerasan seksual adalah salah satu isu penting dan sekaligus yang paling rumit dalam peta kekerasan terhadap perempuan. Mengurai simpul akar permasalahan dan memecah kebuisan para perempuan korban kasus kekerasan seksual hanya dapat terjadi dengan mendekatkannya pada penglihatan, pendengaran, pikiran dan hati masyarakat.

Dalam potret nasional, kekerasan seksual selalu menduduki porsi terbesar dari bentuk kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan KtP tahun 2009, misalnya, menunjukkan bahwa dalam kekerasan di rumah (KDRT) dan relasi personal yang mencapai 95% atau 136,849 kasus, sebanyak 48,68% di antaranya adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual seolah menjadi puncak dari berbagai kekerasan lain yang dialami perempuan, dimana korban juga mengalami kekerasan secara fisik

maupun psikologis. Kekerasan seksual juga ditemukan di ranah komunitas dan negara. Pelecehan seksual, ancaman dan tindak perkosaan, eksploitasi seksual dalam berbagai bentuknya, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual adalah sejumlah kasus yang berhasil dicatat Komnas Perempuan. Berbagai temuan Komnas Perempuan, mulai dari kasus Mei 98, peristiwa 1965, Aceh, Poso, Ambon, Manggarai hingga Papua, menunjukkan kekerasan seksual terus berulang dan membentuk pola yang khas dialami oleh perempuan dalam situasi konflik. Perempuan pembela HAM, perempuan penyandang cacat, yang hidup dengan HIV/AIDS dan pekerja migran juga rentan dengan kekerasan seksual. Kerentanan ini semakin menguat dengan berkembangnya kebijakan-kebijakan yang berbasis pada alasan moralitas dan agama, dimana tubuh dan seksualitas perempuan menjadi objek regulasi dan kriminalisasi. Dalam kebijakan ini, perempuan kembali disudutkan sebagai biang keladi dan penanggung jawab atas semua bentuk kekerasan seksual yang menimpanya serta yang menyebabkan kerugian di masyarakat.

Keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual tampaknya masih jauh harapan. Cara pandang yang menyudutkan perempuan juga diyakini oleh banyak perempuan korban sehingga mereka memilih untuk bungkam. Perempuan belum mengenali pengalamannya itu sebagai sebuah tindak kekerasan dan bahkan ada yang ikut mempersalahkan dirinya sendiri. Korban juga tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena, seperti juga masyarakat pada umumnya, tingkat kepercayaan pada sistem hukum yang begitu rendah akibat maraknya korupsi. Korban yang mau melapor pun belum tentu memperoleh keadilan. Definisi tindak kekerasan seksual yang sempit, misalnya dalam hal perkosaan, ataupun justru dicampuradukkan dengan persoalan moralitas, ketentuan tentang alat pembuktian yang justru menyulitkan korban, ketiadaan infrastruktur yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban, dan sikap aparat penegak hukum yang tidak sensitif pada pengalaman korban adalah berbagai lapisan persoalan yang dihadapi perempuan korban dalam mengupayakan keadilan lewat jalur hukum. Belum lagi stigmatisasi oleh masyarakat yang harus ditanggung oleh korban selama dan pasca proses hukum.

Mencermati persoalan di atas maka Komnas Perempuan bermaksud menjadikan isu kekerasan seksual sebagai fokus kampanye lima tahun berturut-turut, sejak 2010 hingga 2014. Setiap tahunnya, akan ada target-target yang menuntun lompatan menuju pemenuhan hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihannya. Pada tahun pertama dari kampanye ini, Komnas Perempuan akan menginisiasi upaya pengumpulan dan pendokumentasian atas seluruh informasi terkait dengan kekerasan seksual, baik bentuk maupun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Basis informasi ini menjadi sumber pengetahuan untuk mengajak publik mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami akar permasalahan, kompleksitas, kontestasi dan penyelesaiannya. Proses ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk memunculkan inisiatif, daya, dan ruang untuk beraksi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Simpul akhir dalam perjuangan kampanye ini dalam lima tahun ke depan adalah menuju bangunan hukum yang menjamin keadilan dan berlandaskan perspektif bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan pelanggaran susila semata. Bangunan ini hendaknya menjadi bagian dari advokasi menuju revisi KUHP dan KUHP, dan RUU Kekerasan Seksual yang menjadi salah satu program legislasi nasional. Tentunya selain bangunan hukum, kampanye lima tahun ini menasar pada perubahan sikap masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual, dari stigmatisasi menjadi sumber kekuatan upaya penanganan berbasis komunitas.

Pemilihan tema kekerasan seksual sesungguhnya tidak berarti memutuskan perhatian pada isu-isu yang lain, melainkan menajamkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam persilangan isu maupun dalam keterkaitannya dengan persoalan sosial lainnya. Untuk itu, Komnas Perempuan mempersilahkan mitra kampanye untuk secara leluasa untuk mengadopsi tema tersebut berdasarkan fokus kerja masing-masing. Kami menggunakan kesempatan ini untuk juga mengajak seluruh mitra kampanye turut serta dalam pendokumentasian berbagai informasi yang terkait dengan **Kekerasan Seksual** sejak hari ini hingga setidaknya lima tahun mendatang. Meskipun demikian, para mitra juga dapat memilih tema lain bagi kegiatan kampanye di daerahnya masing-masing yang sesuai dengan dinamika setempat.

PUSAT INFORMASI UNTUK KAMPANYE 16 HAKTP 2010

Salah satu peran Komnas Perempuan adalah menjadi pusat informasi yang sekaligus menjadi penghubung jaringan kerja kampanye 16 HAKTP di seluruh Indonesia. Pada pusat informasi, Komnas Perempuan akan menyediakan informasi-informasi rujukan terkait tema diskusi dan desain alat-alat kampanye yang dapat digunakan dalam kampanye, serta mengelola permintaan narasumber bagi kegiatan mitra. Di sini pula agenda dan informasi seputar kegiatan mitra kampanye akan dikompilasi dan dipublikasikan kepada jaringan kerja di tingkat nasional, media massa maupun jaringan kampanye 16 Hari di tingkat global. Adalah bagian dari layanan kami untuk memberitakan seluruh informasi menjelang, selama dan hingga berakhirnya kampanye ini di Indonesia.

Daftarkan segera kegiatan organisasimu untuk kompilasi agenda nasional melalui email ke site@komnasperempuan.or.id atau fax ke 021-3903922.

Untuk Informasi lebih lanjut kunjungi www.komnasperempuan.or.id atau **facebook Komnas Perempuan**, atau hubungi Komnas Perempuan di 021 3903963, dengan Site (081932787358) atau Rere.

ⁱ G-16 atau Gerakan 16 Hari untuk Selamanya adalah upaya penggalangan dana abadi untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pendampingan bagi para perempuan korban kekerasan di Indonesia. Dana abadi ini dikelola melalui mekanisme Pundi Perempuan, yang setiap tahunnya sejak tahun 2003, memberikan dukungan operasional bagi 6 lembaga pengada layanan di seluruh Indonesia. Dana abadi ini diharapkan akan mampu mendukung lebih banyak lagi lembaga pengada layanan, yang sebagian besar adalah mitra kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan